

**REPRESENTASI KEKERASAN DALAM KEKUASAAN  
STUDI PERATURAN DAERAH BANYUMAS NO. 16 TAHUN 2015  
TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT MASYARAKAT**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi  
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)**

**Oleh :**

**UKHTI RISKY NURUL 'AENI**

**NIM. 1223102016**

**PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM**

**JURUSAN PENYIARAN ISLAM**

**FAKULTAS DAKWAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

**PURWOKERTO**

**2019**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Jika bicara mengenai kekuasaan selalu identik dengan politik yang dimana dapat kita lihat politik tanpa kekuasaan itu seperti agama tanpa moral. Namun satu hal yang perlu digaris bawahi bahwa, konsep kekuasaan bukan satu-satunya konsep dalam ilmu politik, kekuasaan merupakan suatu hal yang selalu berhubungan antar manusia, dalam pemegang kekuasaan dapat seorang individu, kelompok, atau pun pemerintah sasaran kekuasaan dapat berupa individu atau pun kelompok.<sup>1</sup>

Kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi individu ataupun kelompok untuk bertindak seperti apa yang dia perintahkan atau anjurkan. Pelaku yang menjalankan kekuasaan dapat berupa seseorang atau individu, kelompok, organisasi, maupun pemerintah. Kekuasaan itu sendiri berkaitan erat dengan modalitas, diantaranya pengaruh (*influence*), persuasi, kedudukan dan *power*.

*Harold D. laswel* menjelaskan bahwa kekuasaan adalah suatu hubungan dimana seseorang atau sekelompok orang dapat menentukan tindakan seseorang atau kelompok lain kearah pihak pertama, perumusan yang paling umum dikenal yaitu kekuasaan merupakan kemampuan seseorang pelaku untuk mempengaruhi pelaku dengan seorang pelaku lain dalam hal ini kekuasaan

---

<sup>1</sup> Miriam Budiarjo, *DASAR-DASAR ILMU POLTIK*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,2007), hlm. 59-70.

selalu berlangsung minimal antara dua pihak jadi di antara pihak itu terkait atau saling berhubungan.

Max Weber mendefinisikan kekuasaan sebagai kesempatan yang ada pada seseorang atau sejumlah orang untuk melaksanakan kemauannya sendiri dalam suatu tindakan sosial, meskipun mendapat tantangan dari orang lain yang terlibat dalam tindakan itu.<sup>2</sup> Kesempatan (*chance* atau *probability*) merupakan satu konsep yang sangat inti dalam definisi Weber. Dalam definisi tersebut, kesempatan dapat dihubungkan dengan ekonomi, kehormatan, partai politik atau dengan apa saja yang merupakan sumber kekuasaan bagi seseorang. Kesempatan seorang pejabat untuk melaksanakan kemauannya tentu lebih besar dibanding kesempatan seorang petani.

Sedangkan menurut Amitai Etzioni, kekuasaan adalah kemampuan untuk mengatasi sebagian atau semua perlawanan, untuk mengadakan perubahan-perubahan pada pihak yang memberikan oposisi.<sup>3</sup> Dari definisi di atas kita bisa melihat adanya perbedaan pandangan antara Weber dengan Etzioni. Definisi Weber nampaknya lebih netral, sedangkan Etzioni memperlihatkan hubungan yang agak negatif dan kurang diinginkan, karena mereka yang dikuasai merasa kehilangan kebebasan.

Dalam kehidupan kekuasaan senantiasa ada didalam setiap masyarakat baik itu dalam masyarakat yang *multikultur* atau pun *majemuk* walau pun kekuasaan selalu ada namun kekuasaan tidak dapat dibagi rata pada semua anggota

---

<sup>2</sup> Thomas Santoso, “ *Kekuasaan dan Kekerasan, Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*”, (Tahun XIV, Nomor 4: Oktober, 2001), hlm. 89 — Lihat juga Poloma, Margaret M., *Contemporary Sociological Theory* (New York: MacMillan Publishing, Co., 1979).

<sup>3</sup> Thomas Santoso, “ *Kekuasaan dan Kekerasan, Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*”,... hlm. 90

masyarakat, justru karena pembagian yang tidak merata tadi timbul makna pokok dari bentuk kekuasaan yaitu adanya orang atau individu yang dapat mempengaruhi pihak lain karena adanya suatu hal yang dikuasai.

Menurut Etzioni, asset/milik/ modal yang ada pada seseorang (misal uang, benda berharga, kekuatan fisik, dan pengetahuan) dapat dipergunakan oleh pemiliknya untuk menunjang kekuasaan. Asset sering juga disebut kekuasaan potensial atau sumber kekuasaan. Hal ini untuk membedakan dengan kekuasaan aktif yaitu kekuasaan yang sudah dituang dalam bentuk tindakan.

Asset bersifat kurang lebih stabil, sedangkan kekuasaan bersifat dinamik atau prosesusual. Gejala kekuasaan adalah menterjemahkan asset-asset ini ke dalam kekuasaan. Menterjemahkan asset-asset ini ke dalam kekuasaan akan menghasilkan berbagai sanksi, imbalan, dan alat-alat (instrumen) untuk menghukum mereka yang menghalangi dan memberikan fasilitas kepada mereka yang mengikuti kemauannya. Sanksi, imbalan dan alat-alat ini dapat bersifat fisik, materiil atau simbolik.

Bahasa merupakan praktik kekuasaan. Wacana dapat digunakan untuk memperbesar pengaruh kekuasaan. Wacana dapat menjadi sarana untuk memarjinalkan dan merendahkan kelompok yang tidak dominan dalam wacana. Melalui bahasa seseorang dapat ditampilkan secara baik ataupun buruk kepada khalayak. Bahasa tidak dimaknai sebagai sesuatu yang netral yang dapat mentransmisikan dan menghadirkan realitas seperti keadaan aslinya, melainkan ia sudah bermuatan kekuasaan.

Bahasa dalam kekuasaan diwujudkan dalam ketetapan-ketetapan pemerintah seperti undang-undang, Peraturan Presiden, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati atau Peraturan Daerah. Ketetapan-ketetapan tersebut merupakan Asset yang digunakan oleh pemegang kekuasaan untuk menunjang kekuasaan.

Bagi kebanyakan orang, bahasa dan kekuasaan adalah dua bidang yang tidak berhubungan. Pengamatan ini hampir benar manakala bahasa hanya direduksi sebagai tatabahasa dan kekuasaan hanya direduksi sebagai teori politik belaka. Dalam praktik sosial, semua itu akan kelihatan transparan.

Kekuasaan itu pada intinya adalah pengaruh. Yakni proses mempengaruhi pihak lain agar sesuai dengan tujuan dari si pelaku. Bila perlu upaya mempengaruhi itu dilakukan dengan paksaan, selain dengan usaha-usaha persuasive. Semakin kuat posisi seseorang dalam struktur kekuasaan, lebih-lebih kekuasaan formal dalam struktur kenegaraan, maka kian kuatlah pengaruh itu untuk dimainkan sehingga setiap pihak akan berada dalam dominasi kekuasaannya.

Dalam kehidupan politik kenegaraan, kekuasaan seseorang atau mereka yang berkuasa, menyebar bukan sekadar melalui alat-alat politik termasuk di dalamnya birokrasi. Lebih jauh lagi kekuasaan itu menyebar dan diaktualisasikan melalui bahasa. Bahasa yang dipakai seringkali mencerminkan bangunan dan proses kekuasaan yang dominant. Seperti kata Habermas bahwa bahasa adalah kepentingan. Kepentingan dari siapa yang memakainya. Dan mereka yang memiliki kekuasaan juga menguasai bahasa, yakni bahasa yang membawa kepentingan kekuasaannya.

Kekuasaan tentu tidak begitu saja diperoleh namun ada proses dan hal yang menunjang untuk menempatkan diri pada pemegang kekuasaan, sumber kekuasaan itu sendiri sangat lah bermacam-macam ada dengan kekayaan, sarana paksaan fisik, keahlian, kedudukan serta agama.

Sumber kekuasaan di ibaratkan seperti supplement yang ditambahkan di dalam tubuh manusia yang digunakan untuk menguatkan kemampuan dalam mempengaruhi orang lain, dalam suatu hubungan kekuasaan selalu ada satu pihak yang lebih kuat dari pihak lain, jadi selalu ada hubungan tidak seimbang dan akibatnya ketidakseimbangan itu sering menimbulkan kekerasan.

Kekerasan tidak saja berarti serangan fisik terhadap seseorang atau perusakan terhadap milik seseorang, tetapi juga meliputi semua bentuk tindakan yang dapat menghalangi seseorang untuk merealisasikan potensi dirinya dan mengembangkan pribadinya.

Dari uraian singkat ini dapat diketahui bahwa kekerasan tidak hanya meliputi dimensi fisik, akan tetapi juga dimensi yang bersifat psikologis. Dengan kata lain, tindak kekerasan tidak hanya meliputi pencurian, perampokan, penganiayaan dan pembunuhan, akan tetapi juga kebohongan, indoktrinasi, ancaman, tekanan, dan sejenisnya, yang dilakukan untuk menghasilkan akibat terhalangnya aktualisasi kemampuan potensial mental dan daya pikir seseorang.

Pengertian mengenai kekerasan dibahas oleh Johan Galtung yang menyatakan bahwa kekerasan terjadi saat ada penyalahgunaan wawasan, sumber-sumber daya dan hasil kemajuan untuk tujuan lain atau dimonopoli

oleh sekelompok orang tertentu. Yang menjadi fokus dalam definisi tersebut adalah "sekelompok orang". Ketika berbicara dalam konteks kekuasaan, maka yang dapat diartikan dengan "sekelompok orang" tersebut adalah sekelompok orang yang dalam relasi sosialnya berada dalam posisi bisa menjalankan apa yang diinginkan. Selain itu, Galtung menyebutkan kekerasan dapat berbentuk sebagai kekerasan fisik dan psikologis, walaupun keduanya dapat terjadi bersamaan. Dalam uraiannya, Galtung menyebutkan bahwa sasaran dalam kekerasan fisik adalah tubuh manusia. Sedangkan kekerasan psikologis berkaitan dengan kebohongan, indoktrinasi, ancaman, tekanan yang berakibat pada meminimalisasi kemampuan mental dan otak.<sup>4</sup>

Pemerintahan Daerah (Pemda) Banyumas yang dipimpin oleh Ir. Achmad Husein, telah menetapkan beberapa Peraturan Daerah (Perda), salah satunya adalah Perda No. 16 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat. Maksud dan tujuan dibuatnya Perda ini adalah sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam penanggulangan penyakit masyarakat agar melindungi masyarakat dari segala kemungkinan yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan dan gangguan sosial lainnya serta menciptakan kondisi masyarakat yang tertib dari kerawanan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat dan mencegah perbuatan yang dapat merusak moral generasi muda<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> Jurnal Kathleen H., *Structural violence as a human rights violation*, Essex Human Right Review Vol. 4 No. 2 September 2007

<sup>5</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No.16. 2015. Penanggulangan Penyakit Masyarakat. Salinan. BAB II Maksud dan Tujuan. Pasal 2-3. hlm 6-7

Setelah diberlakukannya Perda No. 16 Tahun 2015 Tentang Peanggulangan Penyakit Masyarakat banyak penolakan dari masyarakat. Penolakan diwujudkan dalam aksi massa dan audiensi kepada Bupati dan DPRD Banyumas, untuk mencabut perda tersebut.

Penolakan terjadi dikarenakan Perda Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 tentang penanggulangan penyakit masyarakat tidak sejalan dengan Pasal 34 UUD 1945 yang menyatakan fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara Negara.<sup>6</sup> Yang artinya mereka seharusnya menjadi tanggung jawab Negara termasuk dipelihara oleh pemerintah daerah yang mereka tempati.

Berdasarkan hal-hal yang dipaparkan diatas, peneliti kemudian tertarik untuk meneliti lebih dalam dengan bentuk skripsi yang berjudul : Representasi Kekerasan Dalam Kekuasaan Studi Peraturan Daerah Banyumas No.16 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat .

## B. Penegasan Istilah

### a. Kekerasan

Kekerasan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kekerasan yang berkaitan dengan ancaman dan tekanan yang terdapat pada rekayasa bahasa dalam peraturan daerah Banyumas no.16 tahun 2015 tentang penanggulangan penyakit masyarakat.

---

<sup>6</sup> Dalam pasal 34 ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa “fakir miskin dan anak-anak dipelihara oleh Negara. Maka secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa semua orang miskin dan semua anak terlantar pada prinsipnya dipelihara oleh Negara, tetapi pada kenyataan yang ada di lapangan bahwa tidak semua orang miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara. Lihat Koentjoro, Diana Halim, *Implementasi Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Terhadap Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar*; Hukum Perdata, (Jakarta:Fakultas Hukum Unika Atma Jaya, 2006).



## b. Kekuasaan

Sebagaimana dalam buku *Leviathan*<sup>7</sup>, Hobbes mengartikan kekuasaan bagi seseorang merupakan alat untuk meraih masa depan yang bagus. Oleh karena itu setiap orang akan berusaha memperoleh kekuasaan dengan cara mengejar posisi yang memungkinkan bisa meraih kekuasaan dan menggunakannya. Sedangkan Weber mengartikan kekuasaan merupakan kemungkinan seseorang dalam relasi sosialnya berada dalam posisi bisa menjalankan apa yang diinginkan, meski menghadapi resistensi<sup>8</sup>. Dari pengertian tersebut kekuasaan menurut penulis adalah seseorang yang dalam relasi sosialnya berada dalam posisi bisa menjalankan apa yang diinginkan untuk meraih masa depan yang bagus.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka peneliti hendak melakukan penelitian dengan rumusan masalah “Bagaimana Representasi Kekerasan dalam Kekuasaan pada Perda Banyumas No. 16 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat ?”.

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Representasi kekerasan pada Perda

---

<sup>7</sup> Lihat Peter Harris, *Foundations of Political Sciences*, Singapore-Tokyo, Prentice Hall, 1997, Hal 5. Lihat juga Arnold K. Sherman dan Aliza Kolker, *The Social Bases of Politics*, Belmont, California: Wadsworth Publishing Company, 1987, hal 28-29.

<sup>8</sup> Zainudin Maliki, *Sosiologi Politik: Makna kekuasaan dan Transformasi politik*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010) hlm. 10

Banyumas No. 16 tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat.

## 2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis, manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:
  - a. Menambah pengetahuan dan wawasan bagi pembaca tentang permasalahan representasi kekerasan pada masyarakat modern yang dibingkai dalam peraturan daerah.
  - b. Dapat dijadikan sebagai bahan acuan di bidang penelitian sejenis atau sebagai bahan pengembangan apabila akan dilakukan penelitian lanjutan.
2. Secara praktis, kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
  - a. Dapat memperluas wacana mahasiswa berkaitan dengan permasalahan kekerasan pada masyarakat.
  - b. Dapat dijadikan bahan acuan untuk Pemerintahan Daerah, agar kedepannya dalam membuat peraturan daerah jauh dari kekerasan pada masyarakat.

## E. Literatur Review

Ada beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis. Misalnya penelitian Nurhayati Hasnah, Mahasiswa

Universitas Negeri Semarang dengan judul penelitiannya “Representasi Kekerasan Simbolik Pada Tubuh Perempuan Dalam Media Massa Online Khusus Perempuan (Studi Kasus Pada Rubrik *Fashion* Dan *Beauty Website Wolipop*)”<sup>9</sup>.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dan dianalisis dengan menggunakan metode semiotika sosial dari Halliday, di mana pendekatan semiotika sosial ini bagian dari penelitian kualitatif yang digunakan untuk menemukan makna di balik sebuah teks. Metode dan pendekatan ini digunakan untuk mendeskripsikan bagaimana representasi dan kekerasan simbolik terhadap tubuh perempuan yang ada dalam teks dan gambar artikel di rubrik *fashion* dan *beauty* dalam *website Wolipop*. Hasnah juga menggunakan perspektif konstruktivisme, perspektif konstruktivisme ini menempatkan analisis wacana sebagai suatu analisis untuk membongkar maksud dan makna-makna dari rubrik *fashion* dan *beauty* dalam *website Wolipop*.

Dalam penelitian tersebut, mendapatkan Hasil analisis teks dan gambar pada rubrik *fashion* dan *beauty website Wolipop* menunjukkan adanya beberapa representasi tubuh perempuan. Representasi tubuh yang pertama bentuk dan ukuran tubuh yakni tubuh kurus atau ramping, tubuh seksi, dan tubuh sehat, representasi tubuh yang ke dua pentingnya merawat tubuh dan

---

<sup>9</sup> Nurhayati Hasnah, 2015. Skripsi. “Representasi Kekerasan Simbolik Pada Tubuh Perempuan Dalam Media Massa Online Khusus Perempuan (Studi Kasus Pada Rubrik *Fashion* dan *Beauty Website Wolipop*)”, Jurusan Sosiologi dan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.

penampilan bagi perempuan, dan representasi tubuh yang ke tiga tubuh sebagai cermin identitas sosial.

Selanjutnya penelitian yang hampir serupa yaitu penelitian *Tesis* dari Preciosa Alnashava J. Mahasiswa Universitas Indonesia dengan judul penelitiannya “Representasi Kekerasan Simbolik Pada Hubungan Romantis Dalam Serial Komedi Situasi (*How I Met Your Mother*)”<sup>10</sup>.

Tesis ini membahas tentang bagaimana representasi kekerasan simbolik dalam hubungan romantis pada serial situasi komedi *How I Met Your Mother* serta bermaksud membongkar ideologi patriarki di balik representasi tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode analisis semiotika Roland Barthes dan teknik pengumpulan data melalui analisis teks, serta studi literatur. Konsep kekerasan simbolik yang digunakan dalam penelitian ini beranggapan bahwa hubungan romantis heteroseksual merupakan bentuk kekerasan simbolik pada perempuan.

Hasil penelitian menunjukan bahwa serial komedi situasi *How I Met Your Mother* menampilkan kekerasan simbolik dengan memproduksi mitos perempuan dalam hubungan romantis sebagai objek seks, makhluk yang emosional dan pihak yang rela berkorban. Mitos ini lah yang menkonstruksi ideologi patriarki di balik komedi situasi *How I Met Your Mother*.

Penelitian yang ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rosmiki Yulita, mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru dengan judul

---

<sup>10</sup> Preciosa Alnashava J., 2012. Tesis. “Representasi Kekerasan Simbolik Pada Hubungan Romantis Dalam Serial Komedi Situasi *How I Met Your Mother*”. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Program studi Pascasarjana Kekhususan Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia Jakarta.

penelitiannya “Analisis Semiotik Unsur Kekerasan Dalam Film Animasi UP”<sup>11</sup>.

Analisis semiotik merupakan suatu ilmu atau metode analisis untuk mengkaji tanda. Tidak dapat dipungkiri bahwa manusia hidup dan berkomunikasi dengan menggunakan banyak tanda misalnya saja film. Film merupakan salah satu jenis media massa yang menjadi saluran berbagai macam konsep serta menimbulkan dampak dari penayangannya. Ketika seseorang menonton sebuah film, maka pesan (*message*) yang disampaikan oleh film berperan dalam pembentukan persepsi seseorang terhadap maksud pesan dalam film tersebut.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah unsur kekerasan yang terdapat dalam film animasi *Up*. Teknik pengumpulan data, penulis menggunakan cara yang relevan dengan metode analisis semiotik. Yaitu dengan data teks adalah teks yang di dalamnya terdapat simbol-simbol yang sengaja dipilih, di mana pemilihan, penyusunan dan penyampaianya tidak bebas dari maksud tertentu, karena itu akan memunculkan makna tertentu. Serta observasi merupakan pengamatan langsung terhadap film animasi *Up* dalam konteks unsur kekerasanyang terdapat pada isi film animasi *Up*, serta dokumentasi dengan cara pengumpulan data tertulis arsip-arsip atau dokumen tentang pendapat dan teori yang berhubungan dengan masalah-masalah dalam penelitian ini.

---

<sup>11</sup> Rosmika Yulita, 2013. Skripsi. “Analisis Semiotik Unsur Kekerasan Dalam Film Animasi UP”. Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam film animasi *Up* terdapat unsur kekerasan diantaranya: kekerasan fisik, seperti perkelahian, pemukulan, penyiksaan, penggunaan senjata api dan kekerasan psikologi meliputi kata-kata kasar, upaya membuat takut, ancaman dan menghancurkan motivasi serta tindakan yang tidak sopan terhadap orang lain yang terdapat dalam film animasi *Up*. Baik buruknya perbuatan pasti ada akibat yang akan ditimbulkan.

Penelitian yang senada juga diteliti oleh Fariska Pujiyanti, mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Susastra Universitas Diponegoro Semarang dengan judul “Dekonstruksi Dominasi Laki-Laki Dalam Novel *The Da Vinci Code* Karya Dan Brown”<sup>12</sup>.

Memang sejak kemunculan Novel *The Da Vinci Code* Karya Dan Brown di publik, novel ini menjadi pembicaraan panas dan mendapatkan reaksi keras dari penganut Kristiani, karena novel ini dianggap telah melecehkan agama mereka. Novel ini mengetengahkan perspektif lain tentang mitologi Kristiani, dengan mendekonstruksi dominasi laki-laki dalam kehidupan khususnya di gereja. Dekonstruksi dominasi laki-laki inilah yang menjadi tema penelitian dan pembahasan tesis ini.

Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah: bagaimanakah novel *The Da Vinci Code* mendekonstruksi dominasi laki-laki. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah dekonstruksi dengan memanfaatkan teori strukturalisme model A.J. Greimas sebagai landasan untuk menemukan oposisi biner bagi langkah kerja dekonstruksi, dan perspektif

---

<sup>12</sup> Fariska Pujiyanti, 2010. Tesis. “Dekonstruksi Dominasi Laki-Laki Dalam Novel *The Da Vinci Code* Karya Dan Brown”. Program Pascasarjana Magister Ilmu Susastra Universitas Diponegoro Semarang.

feminisme dekonstruksi digunakan sebagai pembacaan feminisme atas hasil analisis dekonstruksi.

Hasil analisis struktural menunjukkan adanya dua sumbu pertentangan (oposisi biner) yaitu doxa dan orthodoxa. Hasil analisis dekonstruksi dengan pembacaan perspektif feminisme dekonstruksi menunjukkan adanya dekonstruksi terhadap dominasi laki-laki yang dilakukan oleh doxa meliputi: Yesus menikah dan memiliki keturunan sehingga tidak menafikkan peran Maria Magdalena yang seorang perempuan menjadi mitra Yesus; pengakuan terhadap putri Yesus yang merupakan sebuah pengukuhan terhadap sosok perempuan, karena pada masa Yesus, kelahiran anak perempuan dianggap aib; Maria Magdalena bukan keturunan orang miskin melainkan keturunan bangsawan; Maria Magdalena bukan seorang pelacur melainkan perempuan suci; Yesus berpihak pada perempuan seiring ditunjuknya Maria Magdalena sebagai penggantinya untuk memimpin gereja; konsep ziarah pada makam perempuan yang dianggap tidak tabu; dan proklamasi doxa “*so dark the con of man*” yang mengindikasikan ketidaksukaan doxa pada patriarki. Novel ini juga memperkenalkan simbol-simbol yang mendekonstruksi dominasi laki-laki seperti: *pentacle*, *the vitruvian man*, dan bintang david. Simbol-simbol yang digunakan tadi mengandung arti keharmonisan antara laki-laki dan perempuan.

Penelitian selanjutnya dari Nur Afghhan Hidayatullah, mahasiswa IAIN Purwokerto Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam FAKultas Dakwah dan

Komunikasi, dengan judul penelitiannya “*Representasi Kekerasan Dalam Film “Jagal“ The Act Of Killing (Analisis Semiotik)*”.<sup>13</sup>

Sebagai salah satu media komunikasi massa yang menonjol, film dianggap mampu memberikan pengaruh kepada penonton. Namun kembali kepada bagaimana dan untuk apa film itu diproduksi maka akan terlihat pengaruh negatif atau positifkah yang terdapat pada suatu film tersebut. Film memiliki pengaruh yang besar terhadap jiwa manusia. Penelitian ini adalah penelitian untuk mengetahui representasi kekerasan yang terkandung dalam film “JAGAL” *The Act of Killing* yang di sutradarai oleh Joshua Oppenheimer dengan menggunakan analisis semiotika John Fiske yang terdiri dari tiga level yaitu realitas, representasi, dan ideologi.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi dan dokumentasi. Penulis mengambil 21 scene untuk dianalisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada tiga level menurut semiotik John Fiske yaitu realitas, dan representasi yang menunjukkan pembunuhan, ancaman, penyiksaan, dan perampasan orang yang dituduh komunis maupun komunis, etnis Tionghoa dan Intelektual. Sedangkan level ideologi yang terkandung dalam film “JAGAL” *The Act of Killing* adalah ideologi fasisme yang menunjukkan kekerasan struktur dan nyata oleh rezim Orde Baru dalam menjalankan pemerintahannya.

Dalam film ini terdapat pembantaian yang dilakukan oleh preman dan Organisasi Pemuda Pancasila untuk menunjukkan eksistensi mereka.

---

<sup>13</sup> Nur Afghan, 2017. Skripsi. “*Representasi Kekerasan Dalam Film “Jagal“ The Act Of Killing (Analisis Semiotik)*”. Jurusan Komunikasi Dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, IAIN Purwokerto



Kesimpulan penelitian ini menunjukkan adanya kekerasan terstruktur oleh rezim dengan melibatkan preman dan Pemuda Pancasila sebagai eksekutor dan merekapun menganggap itu sebagai kebebasan yang diberikan negara sehingga pada saat itu tidak terwujud kedamaian, hanya pembantaian semata.

Penelitian lain yang mendukung adalah penelitian dari Umatin Fadilah, dkk.<sup>14</sup> Mahasiswa IAIN Purwokerto Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi, dengan judul penelitiannya “*Konseptualisasi PGOT Dalam Kebijakan Publik (Studi Tentang Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2105 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat)*” yang diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa (LPPM) IAIN Purwokerto pada tahun 2016.

Sejak akhir tahun 2015, di Kabupaten Banyumas dilaksanakan penegakan terhadap Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2015 tentang Penyakit Masyarakat. Penegakan Peraturan Daerah tersebut bertujuan untuk menciptakan ketertiban umum di Kabupaten Banyumas. Akan tetapi seiring dengan dilaksanakannya kebijakan tersebut, terdapat berbagai reaksi negatif masyarakat Banyumas serta PGOT sendiri sebagai subjek hukum dari kebijakan tersebut.

Reaksi ini kemudian memunculkan pertanyaan apakah perumusan kebijakan tersebut sudah sesuai dengan prosedur yang harus ditaati dimana salah satunya adalah melibatkan si subjek hukum sendiri dalam perumusannya, dan

---

<sup>14</sup> Umatin Fadilah, dkk. 2016. Penelitian Kolektif. “*Konseptualisasi PGOT Dalam Kebijakan Publik (Studi Tentang Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2105 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat)*”. Lembaga Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa (LPPM) IAIN Purwokerto

bagaimana sesungguhnya konseptualisasi dari PGOT yang dituangkan dalam kebijakan tersebut serta bagaimana tinjauan ekonomi-politik terhadap Perda tersebut.

Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah; bagaimana konseptualisasi PGOT yang digunakan dalam Perda kabupaten Banyumas Nomor 16 tahun 2015, bagaimana proses perumusan Perda kabupaten Banyumas Nomor 16 tahun 2015, dan bagaimana tinjauan ekonomi-politik terhadap Perda tersebut. Berangkat dari permasalahan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana konseptualisasi PGOT yang digunakan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas nomor 16 tahun 2015 tentang Penyakit Masyarakat, serta bagaimana tinjauan ekonomi-politik terhadap Perda tersebut.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif. Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum primer diperoleh dengan studi pustaka terhadap praturan prundang-undangan yang relevan, bahan hukum sekunder diperoleh melalui doktrin-doktrin hukum, buku-buku, jurnal-jurnal, konsultasi dengan dosen pembimbing, penelusuran informasi melalui internet, wawancara, dan bahan hukum tersier mengutip langsung dari kamus. Teknik analisis yang digunakan adalah pendekatan ekonomi-politik.

## F. Sistematika Penelitian

Penelitian ini akan disusun dalam lima bab. Di sini akan penulis uraikan penyusunan sistematika pembahasannya, yaitu:

Bab I berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, literatur review, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi kerangka teori yang menjadi acuan penulis dalam melakukan penelitian. Teori yang dibahas adalah teori-teori yang paling koheren dengan penelitian, di antaranya: membahas kekuasaan. Kemudian membahas tentang kekerasan yang meliputi definisi kekerasan, bentuk-bentuk kekerasan baik itu verbal maupun non verbal. Terakhir, analisis semiotika Jacques Derrida dengan teori deskonstruksinya yang paling berkaitan dengan simbol kekerasan.

Bab III membahas metodologi penelitian dengan lebih rinci supaya penulis dapat melakukan penelitian dengan akurat dan lebih terukur. Pada bab ini akan mencakup pendekatan dan jenis penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV berisi gambaran umum representasi kekerasan dalam kekuasaan dan analisis semiotika Jacques Derrida pada Perda Banyumas No. 16 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat.

Bab V merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan, saran-saran dan kata-kata penutup, lampiran-lampiran, dan daftar pustaka.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No.16 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat, kita dapat melihat bagaimana si pembuat perda berusaha menggiring pembaca dengan menggunakan *thesis-thesis* yang mendukung agar kemudian pembaca dengan mudah digiring oleh penulis untuk memaknai karya tersebut secara tunggal dan sesuai dengan nilai yang ingin disampaikan oleh pembuat perda.

Dalam perda tersebut tersebut penunggalan makna pembaca dibangun lewat diskripsi PGOT sebagai suatu ‘penyakit masyarakat’. Karena PGOT sudah diklasifikasikan sebagai penyakit—orang-orang yang menderita sakit mental, maka PGOT tersebut harus diberantas. Dengan membangun *thesis-thesis* seperti ini di awal, maka pembuat perda dengan mudah menciptakan satu struktur pemaknaan yang akan diikuti oleh pembaca.

Namun makna tunggal tidak pernah melekat dalam sebuah teks, karena teks memiliki kemungkinan memproduksi makna-makna baru karena sifatnya yang terbuka. Seperti halnya perda tersebut, dimana dengan melihat teks- teks minor yang terdapat dalam perda tersebut kita dapat melihat indikasi

missbehave yang disembunyikan didalam teks dan dilakukan oleh pembuat perda. Sehingga dengan mengetahui indikasi-indikasi minor tersebut maka perda tersebut tidak memiliki makna yang otonom dan tunggal, dimana maknanya akan selalu tertunda akibat munculnya makna-makna baru yang kemungkinan muncul didalam perda tersebut.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No.16 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat Tahun 2015 merupakan Asset Kekuasaan yang mempresentasikan unsur-unsur kekerasan melalui judul perda dan 6 bagian yang terdapat pada isi perda dan telah di analisis peneliti.

Peneliti menemukan unsur-unsur kekerasan dalam dua katagori analisis Louis Althusser, yaitu katagori Ideologi State Apparatus dan Repressive State Apparatus. Dalam Ideologi State Apparatus terdapat unsur-unsur kekerasan pada judul perda dan 4 bagian dalam isi perda (bab I pasal 9, bab IV, bab IX, bab XI). Sedangkan Repressive State Apparatus terdapat unsur-unsur kekerasan pada isi perda sebanyak dua bagian (bab V pasal 16, bab IX pasal 37).

## B. Saran

Berdasarkan penelitian di atas, penulis menyarankan beberapa hal kepada pemegang kekuasaan diantaranya sebagai berikut:

- Dalam melakukan rehabilitasi kepada PGOT jangan hanya berhenti pada pemberian keterampilan saja namun seyogyanya dapat memfasilitasi PGOT pasca pelatihan untuk disalurkan langsung ke

lapangan kerja yang sesuai dengan keahlian PGOT yang sudah dilatih. Dalam mengonsepsikan PGOT seyogyanya jangan melabeli dengan istilah penyakit masyarakat karena tugas dingsos bukan memberi label tsb, akan tetapi ikut berusaha berpartisipasi memecahkan dan memberi kontribusi nyata kepada para PGOT supaya mereka bisa terlepas dari masalah kesejahteraan yang mereka alami.

- Dalam membuat undang-undang sebaiknya juga harus sudah mempersiapkan solusi konkrit, jangan hanya melakukan tindakan represif terhadap PGOT tanpa memberikan solusi yang solutif, peneliti menyarankan mislanya di bangun sebuah pabrik yang pekerjanya dari PGOT itu sendiri, dimana nantinya disitu para PGOT dilatih mentalnya dan dilatih berorganisasi agar PGOT itu sadar akan tanggung jawab sosial dirinya kepada lingkungan dan masyarakatnya.
- Dalam perumusannya, hendaknya tidak hanya bekerja sesuai dengan pesanan, namun seyogyanya melakukan riset secara mendalam, khususnya kepada subjek hukum, agar penegakan perda tersebut bisa lebih efektif dan tidak menuai polemik dari berbagai kalangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adji, S.E. Peni, *Representasi dan Ideologi Kota Yogyakarta dalam Novel Yogyakarta Karya Damien Dematra*. Disampaikan pada Pertemuan Ilmiah Bahasa dan Sastra Indonesia (PIBSI) XXXII, 9-10 November 2010
- Afghan, Nur. 2017. Skripsi. “*Representasi Kekerasan Dalam Film “Jagal“ The Act Of Killing (Analisis Semiotik)*”. Jurusan Komunikasi Dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, IAIN Purwokerto
- Althusser, Louis. 2007. *Filsafat Sebagai Senjata Revolusi*. Yogyakarta: Resist Book
- Althusser, Louis. 2015. *Ideologi dan aparatus ideologi negara (catatan-catatan investigasi)*. Jakarta: Indo Progress
- Al-Fayyadl, Muhammad. 2005. *Derrida*. Yogyakarta: Lkis
- Aminudin, *Tujuan, Strategi dan Model dalam Penelitian Kualitatif: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Malang : Lembaga Penelitian UNISMA
- Arikunto, Suharsimi. 1993. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Bartal. 1976. *Pembinaan Sosial*. Rineka Cipta: Jakarta,
- Budiarjo, Miriam. 2007. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Chazawi, Adami. 2001. “*Pelajaran Hukum Pidana*”. Jakarta: Rajagrafinda Persada
- Darmadi, Hamid. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Bandung: Alfabeta
- Endraswara, Suwardi. 2013. *Metodologi Kritik*. Yogyakarta: Penerbit Ombak
- Fadilah, Umatin. Dkk. 2016. Penelitian Kolektif. “*Konseptualisasi PGOT Dalam Kebijakan Publik (Studi Tentang Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2105 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat)*”. Lembaga Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa (LPPM) IAIN Purwokerto

- Hall, Stuart. 1997. *Representation: Cultural Representations dan Signifying Practices*. (Ed). London: Sage Publications
- Harris, Peter. 1997. *Foundations of Political Sciences*. Singapore-Tokyo. Prentice Hall
- Hartley, John. 2010. *Communication, Culture and Media Studies: Konsep Kunci*. Yogyakarta: Jalasutra
- Hasnah, Nurhayati. 2015. Skripsi. “Representasi Kekerasan Simbolik Pada Tubuh Perempuan Dalam Media Massa Online Khusus Perempuan (Studi Kasus Pada Rubrik *Fashion* dan *Beauty Website Wolipop*)”, Jurusan Sosiologi dan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
- Huraerah, Abu. 2012. *Kekerasan terhadap Anak*. Bandung: Nuansa
- J., Preciosa Alnashava. 2012. Tesis. “Representasi Kekerasan Simbolik Pada Hubungan Romantis Dalam Serial Komedi Situasi *How I Met Your Mother*”. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Program studi Pascasarjana Kekhususan Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia Jakarta.
- Jamil, Salmi. *Violence and Democratic Society, Hooliganisme dan Masyarakat Demokrasi*, \_\_alih bahasa Slamet Raharjo, 2005. Yogyakarta: Pilar Media
- Jurnal Kathleen H. *Structural violence as a human rights violation*, Essex Human Right Review Vol. 4 No. 2 September 2007
- Koentjoro, Diana Halim. *Implementasi Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Terhadap Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar*; Hukum Perdata, (Jakarta:Fakultas Hukum Unika Atma Jaya, 2006).
- Kolker, Arnold K. Sherman dan Aliza. 1987. *The Social Bases of Politics*, Belmont, California: Wadsworth Publishing Company,
- Maliki, Zainudin. 2010. *Sosiologi Politik: Makna kekuasaan dan Transformasi politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Marsana, Windhu, I. 1992. *Kekuasaan & Kekerasan Menurut Johan Galtung*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius
- Moleong, Lexy. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset



- Mustiningsih, Wahyu. 2012. *Para Filsuf dari Plato sampai Ibnu Bajjah*. Yogyakarta: IRCiSod
- Norris, Christopher. 2009. *Membongkar Teori Dekonstruksi Jacques Derrida*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Pamudji. 1985. *Pembinaan Perkotaan di Indonesia*. Bina Aksara: Jakarta
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No.16. 2015. Penanggulangan Penyakit Masyarakat.
- Pujiyanti, Fariska. 2010. Tesis. "Dekonstruksi Dominasi Laki-Laki Dalam Novel *The Da Vinci Code* Karya Dan Brown". Program Pascasarjana Magister Ilmu Susastra Universitas Diponegoro Semarang.
- Ridwan. 2006. *Kekerasan Berbasis Gender (Rekonstruksi Teologis, Yuridis, dan Sosiologi)*. Purwokerto:PSG STAIN Purwokerto
- Sarup, Madan. 2003. "*Post-Strukturalism and Postmodernism*". Yogyakarta: Jendela
- Santoso, Thomas. 2001 " *Kekuasaan dan Kekerasan, Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*", Tahun XIV, Nomor 4: Oktober. Lihat juga Poloma, Margaret M., *Contemporary Sociological Theory* (New York: MacMillan Publishing, Co., 1979).
- S, Bagong. dkk, 2000. *Tindak Kekerasan Mengintai Anak-anak Jatim*. Surabaya: Lutfansah Mediatama
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama
- Storey, John. 2010. *Cultural Studies dan Kajian Budaya Pop*". Yogyakarta: Jalasutra,
- Sugiono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suryabrata, Sumadi. 1992. *Metode Penelitian*. Jakarta: CV Rajawali
- Tangdilintin. 2008. *Pembinaan Generasi Muda*. Kanisius: Yogyakarta
- Theda, Skocpol. 1993. "*The State as a Janus-faced Structure*", dalam Charles Lemert (Ed), *Social Theory. The Multicultural & Classic Readings*. Boulder-San Francisco-Oxford: Westview Press

- Vetriani, Maluda. 2014. *Representasi Kekerasa Terhadap Anak ( Analisis Semiotik Dalam Film “Alangkah Lucunya Negeri Ini” Karya Deddy Mizwar*, eJournal Ilmu Komunikasi: 110-124 ISSN 0000- 0000
- Yulita, Rosmika. 2013. Skripsi. “Analisis Semiotik Unsur Kekerasan Dalam Film Animasi UP”. Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.